



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD MASROFI
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 184595

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 4.012.337.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m²/36 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 258.870.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m²/40 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 380.064.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m²/48 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 379.375.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m²/145 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.188.278.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/48 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 283.110.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m²/440 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.522.640.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 865.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU B100RS AYLTA Tahun 2016, HADIAH Rp. 50.000.000



5. MOTOR, YAMAHA SE88 (JARI JARI) Tahun 2016, HADIAH Rp.
8.000.000
6. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO DAKAR Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 430.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 107.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 373.564.535

F. HARTA LAINNYA Rp. 335.000.000

Sub Total Rp. 5.693.301.535

III. HUTANG Rp. 137.383.338

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.555.918.197

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.